

KEKERASAN DAN KEKUASAAN DALAM PRAKSIS BERBAHASA: Memahami Kekerasan dalam Perspektif Galtung

Oleh **Mudjia Rahardjo**

Penulis adalah Dosen Tetap STAIN Malang dan Peserta Program Doktor UNAIR Surabaya

*“Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa.
Mungkin alam mulai enggan, bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”*

A. Pengantar

Cuplikan sebagian bait lagu Ebiet G. Ade di atas dapat dipakai sebagai bahan renungan atas berbagai konflik multidimensi dan carut-marut persoalan bangsa saat ini. Gejala kekerasan dalam berbagai bentuk sedang merebak di berbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia. Ancaman terbesar bagi negara-kebangsaan (*nation-state*) tampaknya bukan lagi perang antarnegara, tetapi mata rantai kekerasan dalam negeri yang kualitas dan frekuensinya bertambah.

Dalam konteks global selama beberapa bulan terakhir, kita saksikan kekerasan misalnya memuncak di Sri Lanka sebagai komplikasi perang antaretnis sebagai komplikasi perang saudara (antara suku Sinhala yang mayoritas dan Tamil yang minoritas) yang sudah berlangsung bertahun-tahun dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di Zimbabwe, kekerasan terjadi ketika veteran perang menjarah tanah pertanian komersial milik golongan kulit putih. Di Etiopia dan Eretria – dua negara miskin dan bertetangga yang pernah satu bangsa—juga terjadi perang dahsyat. Di Fiji kekerasan mencuat akibat kudeta sipil yang dipelopori George Speight sehingga menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri

Mahindra Chaundhry. Tak ketinggalan pula di Kepulauan Solomon di Samudra Pasifik perang antaretnis terjadi akibat kudeta yang dipimpin Andrew Mori, dan masih banyak lagi yang lain.

Sedangkan di Indonesia kita dirisaukan oleh amukan kekerasan dan kekejaman yang terus berlangsung sejak dua tahun terakhir. Citra kekerasan terlihat jelas pada penjarahan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan. Peristiwa kerusuhan di pasar Glodok Jakarta antara aparat keamanan dan pedagang VCD pada 13 Mei 2000 telah menambah daftar panjang jumlah kerusuhan di Indonesia (Kompas, 14 Mei 2000). Belum lagi kekerasan berbau SARA di Ambon, Aceh, Sambas, Poso, dan beberapa daerah Indonesia yang lain.

Mata dan telinga kita tiba-tiba terhentak oleh peristiwa peledakan bom dahsyat di depan rumah dinas Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Jl. Imam Bonjol Jakarta, Selasa 1 Agustus 2000 yang mengakibatkan dua orang tewas dan dua puluh satu orang mengalami luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina (Kompas, 2/8/00 hlm.1). Peristiwa tersebut sungguh memalukan dan mencoreng muka Indonesia di mata internasional, karena sangat tidak sesuai etika pergaulan dan diplomasi internasional, di mana

kantor kedutaan besar asing memperoleh kekebalan politik. Padahal, saat ini Indonesia sedang bekerja keras memperbaiki citranya di mata dunia internasional.

Ekspresi keganasan dan kekerasan massa juga ditontonkan oleh sebagian masyarakat tanpa ampun membakar hidup-hidup orang yang tertangkap melakukan tindakan kejahatan. Kekerasan kolektif tampaknya sudah menjadi jenis kejahatan baru untuk menghindarkan diri dari konsekuensi dan tanggung jawab individual. Korban pun sudah banyak berjatuh. Sementara para elit politik sedang sibuk menggelar konflik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya demi memperkukuh kekuasaannya, dengan dalih demi kepentingan rakyat. Akibatnya, usaha menyelesaikan konflik secara serius jauh dari panggilan hati nuraninya.

Sampai Perang Dingin berakhir, masyarakat internasional masih beranggapan perang antarnegara merupakan ancaman utama bagi keamanan. Tetapi, setelah era Perang Dingin semakin jauh ditinggalkan, ancaman utama justru bersumber pada aksi kekerasan, kerusakan, penjarahan, banditisme, premanisme dan mafia.

Citra keamanan macam itu disebabkan oleh apa yang disebut konflik tingkat rendah (*Low intensity conflict*). Dalam ekspresinya, LIC meliputi teror, penculikan, pembunuhan, kejahatan, mafia, banditisme, premanisme, perdagangan narkoba, pertikaian etnis dan konflik primordial.

Pembunuhan, rasisme, kemiskinan, perang pada dasarnya dan dari mulanya sudah merupakan kekerasan. Akibat tindakan

kekerasan ini jelas memerosotkan derajat manusia, karena manusia tidak mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan, merealisasikan serta memperkembangkan diri lebih leluasa dan lebih lama lagi. Penyebabnya, tidak hanya tindakan kekerasan nyata, yang langsung dilihat dan dirasakan, oleh pelaku manusia konkret, tetapi juga oleh struktur yang represif, tidak adil, eksploitatif yang menyatu dengan struktur itu sendiri.

Sebagai fenomena sosial, kekerasan telah menarik minat para ilmuwan sosial untuk lebih jauh mempelajari, menggeluti dan mencari kerangka teoretis eksplanatorisnya. Salah satu di antaranya ialah Johan Galtung.

B. Siapa Johan Galtung ?

Johan Galtung (masih hidup) adalah seorang sosiolog, peneliti masalah-masalah konflik dan perdamaian, pendiri dan direktur Institut Penelitian Perdamaian Internasional, di Oslo (1959-1969); profesor penelitian

perdamaian di banyak Universitas serta editor pada **Journal of Peace Research** (1964-1974). Galtung juga dianggap sebagai seorang pelopor studi tentang masalah-masalah konflik dan perdamaian serta mengembangkannya menjadi "ilmu baru" yaitu **polemologi**, ilmu yang mempelajari sebab-musabab sengketa dan penyelesaiannya, mempelajari masalah perdamaian dan syarat-syarat pemeliharannya.

Sebagai seorang pemikir sosial humanistik, Galtung memahami kekerasan sebagai konsep yang paling dasar dan kaya dalam ilmu politik. Kekerasan terjadi dalam pola-pola relasi antar manusia atau negara yang tidak seimbang, yang eksploitatif dan represif. Ketidakseimbangan

**Kekerasan kolektif
tampaknya sudah
menjadi jenis kejahatan
baru untuk
menghindarkan diri dari
konsekuensi
dan tanggung jawab
individual.**

relasi sosial terjadi karena adanya perbedaan dalam segi "ada" (*being*), "memiliki" (*having*) dan "kedudukan" dalam suatu struktur (*structure*), sedangkan kekerasan dipahami sebagai jenis kekuasaan yang merusak relasi harmoni sosial (yang seharusnya).

Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Realisasi potensial adalah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jaman nya. Penyalahgunaan sumber-sumber daya dan hasil-hasil p e r k e m b a n g a n / pembangunan untuk "tujuan lain" atau "dimonopoli" oleh segelintir orang atau kelompok saja, maka terjadi kekerasan dalam sistem ini.

M e m b i a r k a n penderitaan, penyakit atau bencana yang diderita sebagian besar rakyat bawah, padahal sebenarnya bisa diatasi, adalah kekerasan. Jangkauan dan kualitas permasalahan kekuasaan dan kekerasan saat ini sudah bersifat global, membuana luas, menyangkut hubungan semua bangsa atau negara. Tuntutan etika pun berkembang, bukan lagi etika individual yang berurusan dengan kemauan dan perbuatan baik seseorang (mikro) tetapi makro-etika yang menuntut tanggungjawab seluruh masyarakat dan semua bangsa.

Galtung juga mengembangkan konsep yang luas tentang perkembangan dan perdamaian. Sepuluh nilai yang dicuatkan Galtung (pertumbuhan pribadi, pertumbuhan sosio-ekonomi, pemerataan, solidaritas,

keanekaragaman, persamaan, otonomi, partisipasi, keadilan sosial dan keseimbangan ekologis) dapat menjadi strategi perkembangan kebudayaan, baik pada tingkat nasional maupun mondial. Perdamaian bagi Galtung, bukan hanya tidak adanya kekerasan (*absence of violence*) tetapi juga tercapainya keadilan sosial, karena tanpa keadilan sosial tidak mungkin terjadi perdamaian.

Pemikiran Galtung ini kiranya berguna untuk menempatkan serta menjelaskan masalah "ketergantungan" negara-negara berkembang (*Periferi*) pada negara-negara maju (Pusat).

Bangkitnya negara-negara Dunia Ketiga mencapai kemerdekaan lepas dari penjajahan negara asing setelah Perang Dunia II bukan berarti terlepas pula dari "kontrol" asing. Imperialisme atau kolonialisme seperti jaman dulu, menduduki wilayah secara fisik, barangkali jarang terjadi. Namun kolonialisme tidaklah hapus dari muka bumi, ia telah berubah, seperti yang

dikatakan Galtung menjadi neo-kolonialisme atau neo neo-kolonialisme. Rajni Kothari, pemikir India yang ahli dalam masalah-masalah Utara-Selatan, melihat pengaruh *multinational corporations* (MNC), keunggulan modernisasi gaya Barat berikut aturan-aturan sains dan teknologi tidak lepas dari sistem kontrol global, hegemoni, eksploitasi dan penindasan.

C. Definisi Kekerasan Menurut Johan Galtung

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Windhu,

**Membiarkan
penderitaan, penyakit
atau bencana yang
diderita sebagian besar
rakyat bawah, padahal
sebenarnya bisa diatasi,
adalah kekerasan.**

1992). Kata-kata kunci yang perlu diterangkan yaitu : aktual (nyata) dan potensial (mungkin), dibiarkan, serta diatasi atau disingkirkan. Galtung mengambil kasus orang meninggal karena penyakit atau bencana alam. Pada abad ke-18 orang meninggal dunia karena penyakit TBC tidak dikategorikan sebagai kekerasan. Tetapi bila orang itu meninggal pada masa sekarang, di mana peralatan sudah demikian canggih dan obat-obatan sudah banyak ditemukan, tidak diberi pengobatan, di situ ada unsur kekerasan. Apalagi bila orang itu dibiarkan, ditelantarkan hingga mati, jelas ini adalah tindakan kekerasan. Banyak orang meninggal akibat gempa bumi, banjir, angin taufan, atau meletusnya gunung berapi, tidak dikaitkan dengan kekerasan. Tetapi Galtung akan melihatnya sebagai kekerasan bila di masa mendatang peristiwa-peristiwa tersebut bisa diatasi atau dicegah, tetapi tetap dibiarkan.

Dengan kata lain, kekerasan terjadi bila yang potensial lebih tinggi dari yang aktual. Jadi, kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Galtung menggabungkan antara tersedianya fasilitas dan mobilitas dengan kemauan baik untuk mengatasi kekerasan.

Penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh segelintir orang saja, maka ada kekerasan dalam sistem ini. Sebab, keadaan itu menyebabkan tingkat aktualisasi massa rakyat

berada di bawah tingkat potensialnya. Ini yang oleh Galtung disebut sebagai kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural.

Jenis kekerasan lain menurut Galtung adalah kekerasan langsung. Misalnya melukai, membunuh atau perang. Di sini tampak bahwa dengan melukai atau membunuh berarti menempatkan "realisasi jasmani aktualnya" di bawah "realisasi potensialnya". Dengan demikian "realisasi mentalnya" juga tidak dimungkinkan, karena kita tahu bahwa tanpa integritas jasmani, kebebasan untuk merealisasikan diri terhambat.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Galtung mendefinisikan kekerasan dengan amat luas. Sejalan dengan ini, Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu *m e n g h a n c u r k a n* kemampuan somatis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan pembunuhan sebagai bentuk ekstrimnya oleh seorang pelaku yang memang sengaja melakukannya. Menurut Galtung, jika hanya ini

**Dengan kata lain,
kekerasan terjadi bila yang
potensial lebih tinggi dari
yang aktual. Jadi,
kekerasan di sini
didefinisikan sebagai
penyebab perbedaan antara
yang potensial dan yang
aktual.**

yang disebut kekerasan, dan perdamaian sebagai bentuk pengingkaran, maka terlalu sedikit yang ditolak dalam usaha menganut perdamaian sebagai sesuatu yang ideal. Ini berarti tatanan sosial yang secara umum tidak bisa diterima masih dapat disesuaikan dengan perdamaian.

Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Karena dari sudut korban ini, kekerasan tidak banyak bedanya apakah mati kelaparan merupakan akibat serangan militer yang berlarut-larut atau akibat ketidakadilan, ketidakmerataan, dan atau

struktur vertikal dan asimetris. Juga tidak banyak bedanya seseorang dibunuh secara cepat dengan peluru atau mati pelan-pelan karena kekurangan makan.

D. Bahasa dan Kekuasaan

Orang mungkin bertanya, apa hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Apa bahasa bisa melahirkan kekuasaan atau apakah kekuasaan bisa membentuk bahasa? Menurut Habermas – seorang tokoh *postmodernisme* dan teoretisi kritik—seperti dikutip Haedar Nashir (2000: 46) bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan menguasai bahasa, yakni bahasa yang membawa kepentingan kekuasaannya.

Melalui bahasa, suatu kekuasaan dapat menciptakan citra pihak lain sebagai subversif, inkonstitusional, antipembangunan, antikemampuan, dan lain sebagainya yang menggambarkan perlawanan terhadap negara. Pada saat yang sama bahasa juga dapat memberikan citra serba positif, baik dan mulia bagi pemegang kekuasaan.

Karenanya, bahasa bukan sekadar tata bahasa tetapi bahasa adalah membawa muatan kepentingan. Ketika penguasa (baca: Orde Baru) menuduh seorang sebagai antipembangunan, komunis, ekstrim kiri, ekstrim kanan, dan sebutan-sebutan lain yang sejenisnya, dia pasti akan “tersingkir” baik secara politik maupun sosial. Ungkapan-ungkapan itu telah sedemikian ampuh untuk memberangus lawan-lawan politik Orde Baru. Dalam pandangan hidup orang Athena abad ke-5, bahasa menjadi instrumen

untuk mencapai tujuan tertentu, yang kongkrit dan praktis. Bahasa dianggap sebagai senjata ampuh dalam percaturan politik tingkat tinggi (Latif dan Ibrahim: 1996: 17).

Label-label tersebut diberikan kepada kaum oposan atau orang yang tidak sepaham dan tidak disukai penguasa dengan target utama mengingatkan kegelapan masa lampau. Di sini memori publik atas peristiwa masa lampau (baca: G30S/PKI) terus menerus dipupuk dan diawetkan, terutama bagi generasi muda yang belum pernah mengalami peristiwa traumatik tersebut.

Selain label komunis, label lain yang cukup ampuh untuk menyingkirkan lawan politik Orde Baru adalah radikalisme Islam, yang digambarkan bahwa radikalisme Islam tidak kalah berbahayanya daripada komunis. Karena itu dia tidak punya hak hidup di bumi “Pancasila”. Meminjam bahasa Pabottingi (2000), bahasa tidak semata-mata alat

Melalui bahasa, suatu kekuasaan dapat menciptakan citra pihak lain sebagai subversif, inkonstitusional, antipembangunan, antikemampuan, dan lain sebagainya yang menggambarkan perlawanan terhadap negara.

komunikasi penguasa kepada rakyatnya tetapi juga sarana strategis untuk berkuasa. Bahasa adalah ekspresi kekuasaan. Karenanya, bahasa menjadi kancah perhelatan kekuasaan.

Dengan melabel seseorang dengan sebutan-sebutan seperti tersebut di atas, penguasa menurut Galtung telah melakukan kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Sebab, kekerasan menurutnya lebih ditentukan pada segi akibat suatu tindakan daripada bentuk tindakannya itu sendiri. Seseorang akan sangat menderita lahir dan batin –beserta anak dan cucunya di masa pemerintahan Orde Baru.— akibat diberi label komunis, ekstrim kiri, ekstrim kanan, tidak bersih lingkungan, dan lain-lain.

Sebab, peluang kerja baginya menjadi sangat sulit, apalagi menjadi pegawai negeri atau pegawai di lingkungan badan usaha milik negara. Selain itu, semua gerak dan aktivitasnya selalu diawasi penguasa.

Kisah manusia adalah kisah liku-liku bahasa. Dengan maknanya, bahasa bisa menggerakkan dunia dengan kekuatannya. Dengan bahasa pula banyak darah dan airmata bercucuran. Pedang dihunus, dan massa dimobilisasi karena bahasa. Aneka kehormatan, kebahagiaan, sakit hati, kekecewaan, semuanya berawal dan berakhir dengan kata-kata.

Penguasa sering merasa pemilik tunggal bahasa. Karenanya, masyarakat harus tunduk dengannya. Sebutan-sebutan OTB, ekstrim kiri, ekstrim kanan, GPK, kebringasan massal, antipembangunan, antikemapanan, tidak Pancasila, oknum, dalang kerusuhan, kambing hitam, dan lain-lain semuanya adalah **penamaan sepihak** dari penguasa terhadap pihak yang dikhawatirkan dapat merongrong kewibawaan dan kekuasaannya, tanpa ditanya dulu apakah pihak-pihak lain setuju dengan sebutan-sebutan tersebut.

Berbahasa sepihak itu artinya *instruksi* dari penguasa kepada yang dikuasai. Selain itu juga bisa diartikan komando, indoktrinasi, atau intimidasi dari penguasa kepada rakyat. Bila dari rakyat ke penguasa namanya fitnah, gosip, grafiti, demonstrasi, atau selebaran gelap. Ini semua bentuk-bentuk perlawanan simbolik rakyat terhadap penguasa. Sebab, berbahasa yang bermartabat mesti berlangsung secara dialogis yang ini berarti kedua belah pihak mesti dalam posisi kesetaraan. Tetapi, tampaknya kini berbahasa secara dialogis mungkin hanya sebuah utopia (Ariel Heriyanto: 2000, h. 144). Karenanya, propaganda, indoktrinasi, pelecehan, atau sebaliknya penjilatan dan selebaran gelap merajalela.

E. Bahasa dan Kekerasan Simbolik

Sebagai realitas simbolik, bahasa tidak bisa lepas dari dunia batin pemakainya dan *setting* sosial yang ada. Masyarakat Indonesia kini memasuki tahap transisi, setelah lama terkungkung dalam belenggu penguasa yang otoriter dan represif. Meminjam istilah Durkheim (1933) disebut *anomie*, di mana nilai dan norma lama ditumbangkan sedangkan nilai baru belum muncul, cenderung menggambarkan citra masyarakat yang keras, egois, dan individualistik. Masyarakat menjadi pragmatis, demi mengejar cita-cita dan keuntungan pribadinya, dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Naluri-naluri hewaniah untuk hidup senang dengan cepat dan bebas hambatan pun bermunculan. Akibatnya, konflik-konflik sosial berupa kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, pelecehan, perampokan, penindasan, dan lain sebagainya adalah mata rantai dari sifat hewaniah tersebut. Gambaran sebagai masyarakat yang sedang sakit lantas tak dapat dielakkan.

Citra masyarakat yang keras yang seolah sudah kehilangan kendali norma dan nilai itu juga terlihat dengan jelas pada ungkapan-ungkapan bahasa yang dengan mudah terlihat di berbagai tempat sebagai berikut:

1. **Ngebut Benjut!**
2. **Hanya Anjing yang Kencing di Sini,**
3. **Tidak Boleh kencing di Sini Kecuali Anjing,**
4. **Tidak Ada Lowongan Pekerjaan,**
5. **Maaf, Tidak Melayani Permintaan Sumbangan Apapun Tanpa Seizin RT/RW Setempat,**
6. **Tidak menerima Tawaran Promosi atau Jual beli Apapun,**
7. **Tamu Menginap lebih dari 2x24 Jam Harap Laporkan RT/RW Setempat,**
8. **Jalan ini Hanya Khusus Untuk Warga**

Kompleks Perumahan.....

9. Lebih baik terlambat Asalkan Selamat, daripada Cepat Tetapi Sekarat,

10. Pemulung Dilarang Masuk Kawasan Kampung ini.

Jika dicermati, betapa ungkapan-ungkapan tersebut sangat tidak bersahabat bagi siapa saja yang membacanya dan cenderung memandang orang lain sebagai lawan atau paling tidak yang perlu diwaspadai. Bahasa yang mestinya penuh unsur estetika telah berubah menjadi menyeramkan, dan menakutkan. Menurut Kuntowijoyo, dunia simbolik atau simbol-simbol yang dimiliki dan beredar di masyarakat – baik verbal maupun non verbal – telah menggambarkan kondisi masyarakat itu sendiri.

Himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan dengan cepat karena banyak anak kecil bermain, mestinya bisa menggunakan ungkapan lain yang lebih halus tanpa merubah arti pesan, misalnya dengan ungkapan *Hati-Hati Banyak Anak Kecil* atau *Harap Pelan ! Banyak Anak Kecil*. Ungkapan ini terasa halus dan masih dalam batas norma dan santun berbahasa. Demikian juga larangan agar orang tidak kencing di sembarang tempat mestinya bisa dengan *Mohon Tidak Kencing Di Sini*, bukan memperlakukan orang yang kencing layaknya anjing. Sudah tidak adakah kata lain yang lebih halus?

Informasi mengenai ada dan tidak adanya lapangan pekerjaan di suatu institusi tertutup dengan rapat, sehingga tidak ada kesempatan sama sekali bagi masyarakat untuk melamar,

apalagi bekerja. Padahal kenyataannya lowongan pekerjaan tetap ada. Melalui cara-cara sembunyi-sembunyi.

Pernyataan penolakan permintaan sumbangan juga tergambar sangat menyeramkan, walaupun diawali dengan kata *maaf*. Bagaimana RT/RW sebagai kepanjangan penguasa dapat masuk ke urusan-urusan keluarga. Padahal urusan keluarga termasuk ranah privat (*private domain*) bukan, ranah kekuasaan, sehingga RT/RW bisa leluasa ikut campur di dalamnya.

Demikian juga ungkapan-ungkapan larangan yang lain, menunjukkan sikap individualistik yang berlebihan. Ungkapan *“Jalan ini Hanya Khusus untuk Warga Kompleks Perumahan...”* jelas sangat tidak etis. Semua jalan milik umum. Tidak ada jalan milik pribadi. Pembuat pengumuman itu barangkali lupa bahwa dia juga pernah melewati jalan orang lain di tempat lain. Bahasa keseharian di masyarakat juga cenderung menampilkan

Bahasa yang mestinya penuh unsur estetika telah berubah menjadi menyeramkan, dan menakutkan. Menurut Kuntowijoyo, dunia simbolik atau simbol-simbol yang dimiliki dan beredar di masyarakat – baik verbal maupun non verbal – telah menggambarkan kondisi masyarakat itu sendiri.

citra kekerasan simbolik. Kata-kata seperti : digebuk, digantung, diluluhlantakkan, diberangus, dirajam, dibinasakan, dipenggal, kiamat, ditonjok, dan lain-lain menghiasi bahasa keseharian masyarakat baik melalui mass media maupun komunikasi antar orang.

Walhasil, ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan nilai-nilai budaya di masyarakat kita telah berubah. menurut Leo Idra Ardiana – Guru Besar Universitas Negeri Surabaya—nilai-nilai budaya telah berubah, mengalami transformasi. Itu tercermin dari cara berbahasa

masyarakat kita (Surabaya Post, 31/7/200, hlm. 3).

Berbarengan dengan fenomena kekerasan yang melanda bangsa ini, kesopanan atau etika berbahasa kini mengalami erosi atau kemunduran luar biasa. Untuk mengatasi itu, etika kesopanan berbahasa perlu disikapi dalam konteks pengajaran bahasa dalam lahan budaya Indonesia. Meminjam ungkapan Geoffrey Leec kesopanan berbahasa antara lain ditentukan pemilihan kosa katanya (Surabaya Post, 31/7/2000).

Akhirnya kisah manusia adalah kisah lika-liku berbahasa. Dengan kekuatannya bahasa bisa menggerakkan dunia dengan isinya. Ada yang bilang ini berkat makna yang dihamburkannya. Menghabiskan hidup dengan bahasa berarti mengisi hidup ini penuh dengan makna. Ada yang enak, ada yang tidak.

Aneka kebahagiaan, kehormatan, sakit hati, dan kekecewaan pun berawal dan berakhir dengan kata-kata. Para sastrawan mendapatkan jati dirinya dengan bahasa. Para pengacara, hakim, jaksa, sarjana, guru, wartawan mendapatkan nafkah dari kemahiran berbahasa. Perang yang dahsyat berawal dan berakhir dengan perantaraan bahasa. Di dunia ini banyak darah dan genangan air mata gara-gara bahasa. Melalui bahasa, orang bisa tersenyum bahagia, sebab bahasa memang penuh estetika. Tetapi melalui bahasa pula, orang bisa mengucurkan air mata, sebab orang bisa memanipulasi makna karenanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2000. *Kekuasaan Otoritas dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni. Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Off-set.
- Heriyanto, Ariel. 2000. *Perlawanan dalam Kepatuban*, Bandung: Mizan. Kompas, 11 Mei 2000.
- Kompas, 1 Agustus 2000, hlm. 1.
- Latif, Yudi. dan Idi Subandy Ibrahim, 1996, *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Nashir, Haedar. 2000. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pabottingi, Mochtar. 1996. *Bahasa Kramanisasi dan Kekerasan*, dalam Yudi Latif dan Idy Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik wacana di Panggung Politik Orde Baru*. Bandung : Mizan.
- Sanderson, Stephen K. 1993, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*_Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Surabaya Post, 31 Juli 2000, hlm. 3.
- Windhu, I Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.